

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DESA CINTANAGARA KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS

Ade Ryan Zatnika

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : aderyanzatnika999@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi yang menemukan beberapa permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanagara kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis yaitu: Masih kurang optimalnya partisipasi masyarakat Desa Cintanagara dalam kelompok tani, dan kurangnya dukungan anggaran dari APBDes sehingga pemberdayaan masyarakat di Desa Cintanagara belum optimal, hal ini terlihat dari data realisasi APBDes Tahun 2020 tidak adanya anggaran yang terealisasi pada bidang pemberdayaan masyarakat. Dan Pemerintah Desa Cintanagara masih kurang dalam memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat bidang pertanian berupa menjalin kerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dan upaya bantuan permodalan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanagara kecamatan Jatinagara Kabupaten?”. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanagara kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator, terdapat 2 (dua) indikator yang belum terlaksana dengan baik, di antaranya, yaitu indikator bina lingkungan dan bina kelembagaan hal ini dikarenakan terbatasnya SDM dan tenaga serta waktu mengenai hal tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanagara kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Pertanian, Pemerintah desa*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia berpusat pada sektor pertanian, karena sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah karena peranannya yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang maupun pemulihan ekonomi bangsa. Dan peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasilan bahan pokok, sandang, papan, dan menyediakan lapangan kerja terhadap sebagian besar penduduknya pada negara yang berkembang seperti di Indonesia ini.

Pertanian menjadi sumber mata pencaharian mayoritas bagi angkatan kerja di Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, serta mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Pada masyarakat pedesaan sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil panen yang didapatkan.

Maka dari itu pemberdayaan sangatlah perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat apalagi di bidang pertanian yang mayoritas angkatan kerja di Indonesia adalah petani.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan

masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, telah mengatur mengenai pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat di bidang pertanian. Dalam peraturan tersebut mengatur kelembagaan petani ditumbuh kembangkan oleh, dari dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kemudian kelembagaan petani yang dimaksud adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas petani, dan dewan komoditas pertanian sosial. Secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Nomor 67/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, memiliki keterikatan dan keterkaitan dimana sama-sama bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program yang sebelumnya telah direncanakan.

Untuk terlaksananya pemberdayaan yang optimal peran pemerintah terhadap pertanian sangat membantu masyarakat untuk dapat

mengembangkan potensi sumberdaya yang ada. Bantuan yang berasal dari pemerintah berawal dari musyawarah masyarakat Desa yang mengajukan permintaan melalui kelompok tani. Bagi petani setempat, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan karena dapat mengurangi beban pengeluaran. Selain itu, kebutuhan pertanian yang diharapkan petani dari pemerintah tidak selalu dapat terealisasi dengan baik.

Selain itu, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tugas yang diemban dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan terhadap individu-individu, masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Sehingga peran tersebut dapat memberikan dampak yang positif terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh individu atau masyarakat dan dapat memenuhi harapan-harapan petani. Hal yang membuat pertanian semakin berkembang dengan adanya bantuan penyuluhan yang diberikan pemerintah. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa. Meningkatnya pola plasir petani dalam melakukan pekerjaannya dibidang pertanian membuat bertambah kualitas hasil produksi.

Desa Cintanagara kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis mempunyai wilayah seluas 919 hektar yang terdiri dari lahan sawah 86 hektar, lahan ladang 348 hektar, lahan perkebunan 165 hektar, hutan 116 hektar dan lahan lainnya 204 hektar. Penggunaan lahan didominasi oleh

lahan pertanian terlihat dari 919 hektar hampir 80% lahan yang ada di Desa Cintanagara diperuntukan untuk lahan pertanian. Karena Desa Cintanagara termasuk daerah pegunungan yang memiliki tanah yang subur sehingga sangat cocok untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan dan sayuran maka sebagian besar tanah yang ada di Desa Cintanagara dijadikan lahan pertanian.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi petani di Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat dilihat dari indikator –indikator sebagai berikut: 1) Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Cintanagara dalam kelompok tani, hal ini dapat dilihat dari 5.364 jiwa penduduk Desa Cintanagara yang mengikuti kelompok tani hanya 951 jiwa. 2) Kurangnya dukungan anggaran dari APBDes sehingga pemberdayaan masyarakat di Desa Cintanagara belum optimal, hal ini terlihat dari data realisasi APBDes Tahun 2020 tidak adanya anggaran yang terealisasi pada bidang pemberdayaan masyarakat. 3) Pemerintah Desa Cintanagara masih kurang dalam memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat bidang pertanian berupa menjalin kerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dan upaya bantuan permodalan. Contohnya Pemerintah Desa Cintanagara belum dapat memberikan daya dukung berupa fasilitas kepada masyarakat seperti kemudahan akses bagi masyarakat di bidang pertanian untuk memperoleh

bantuan modal dalam pengembangan usaha.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemerintah Desa Cintanagara belum optimal dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut: 1) Pemerintah Desa Cintanagara kurang dalam melakukan identifikasi terhadap potensi SDM sehingga terbatasnya data dan informasi mengenai potensi SDM. 2) Pemerintah Desa Cintanagara kurang dalam menganggarkan dana dari APBDes pada pelaksanaan pelatihan dan pembinaan 3) Pemerintah Desa Cintanagara kurang meningkatkan kemampuan inovatif masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam mengembangkan bidang pertanian. Hal ini disebabkan pemerintah desa masih kurang dalam penyuluhan kepada masyarakat dalam membantu dan memasarkan hasil produksinya.

Permasalahan yang terjadi sangatlah kompleks maka dari itu agar lebih spesifik penelitian ini di fokuskan pada hal berikut ini: Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanagara kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis?

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengambil judul “Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis”.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari istilah *empowerment*. Di Indonesia, istilah pemberdayaan sudah di kenal pada tahun 1990-an. Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. Secara umum pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan dimana pemberdayaan masyarakat sudah menjadi agenda utama dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam suatu proses pembangunan, pemberdayaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena dengan adanya pemberdayaan akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Adapun pengertian pemberdayaan menurut Suharto (2014:57) Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap

kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Soetomo (2018:88) berpendapat bahwa unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal.

Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi penduduk.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, telah mengatur mengenai pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat di bidang pertanian. Dalam peraturan tersebut mengatur kelembagaan petani ditumbuh kembangkan oleh, dari dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Kemudian kelembagaan petani yang dimaksud adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas petani, dan dewan komoditas pertanian sosial. Secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Nomor 67/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, memiliki keterikatan dan keterkaitan dimana sama-sama bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program yang sebelumnya telah direncanakan.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dimana didalamnya telah diatur pemberdayaan petani bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan petani, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani.

Menurut Endang Sri Rahayu (2010: 111) Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan petani meliputi:

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar,

b. Tahap transformasi kemampuan petani berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan, dan Tahap peningkatan kemampuan intelektual petani, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif mengantarkan pada kemandirian. Pada tahap penyadaran ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan petani. Pada tahap ini penyuluh sebagai pihak yang memberdayakan, memberikan sentuhan penyadaran yang akan membuka keinginan dan kesadaran petani mengenai kondisinya saat ini, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya perbaikan kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Upaya Pokok dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan masyarakat, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat). Mardikanto (2019:113) merumuskan upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah Bina Manusia, Bina Usaha,

Bina Lingkungan, dan menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan.

1. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu kehidupan atau kesejahteraan manusia.

2. Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan.

3. Bina Lingkungan

Selama ini pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan pelestarian hidup. Tetapi dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap berkelanjutan bisnis dan kehidupan.

4. Bina Kelembagaan

Di depan telah dikemukakan, bahwa tersediannya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan. Pengertian tentang kelembagaan seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas.

METODE

Uber Silalahi (2012:12) menjelaskan bahwa: “Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut”

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 8 bulan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang yang terdiri dari kepala Desa Cintanagara, Seketaris Desa, Kepala Seksi Pelayanan Desa, Ketua LPMD, dan perwakilan kelompok tani Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Reduksi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis

Berbagai pengertian mengenai pemberdayaan yang diungkapkan oleh beberapa pakar pemberdayaan pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, namun dalam hal ini peneliti memaparkan pengertian penelitian

yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S (2019:100) yang dipaparkan dalam penelasannya berikut ini:

Pemberdayaan merupakan proses social, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada hal tersebut, kemudian penulis dapat menjelaskan hasil wawancara setiap informan penelitian dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti selama di lapangan mengenai pelaksanaan pemberdayaan Desa Cintanagara dengan mengacu kepada dimensi berikut ini:

a. Bina Manusia

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hal terpenting dalam sebuah pemberdayaan adalah SDM petani, hal tersebut karena akan berpengaruh terhadap tujuan dari pemberdayaan tersebut. Dengan manajemen SDM petani yang baik maka akan menghasilkan *output* pemberdayaan yang sesuai harapan serta dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau

kesejahteraan manusia. Oleh karena itu bina manusia merupakan salah satu manajemen SDM petani yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan di Desa Cintanagara.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mardikanto (2019:114) yang menyatakan bahwa: Disamping itu, dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik, sebab selain sebagai salah satu sumberdaya yang sekaligus sebagai pelaku pengelola manajemen itu sendiri termasuk dalam bina manusia, adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa pelaksanaan bina manusia bidang pertanian yang dilakukan pada pelaksanaan pemberdayaan di Desa Cintanagara belum mampu mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat tani dengan maksimal terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat tani dan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan bina manusia bidang pertanian yang tidak dilakukan sepenuhnya terutama dalam hal monitoring terhadap masyarakat tani yang telah melakukan pelatihan dan pembinaan. Dengan demikian, pemerintahan desa tidak mengetahui hasil yang dicapai dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian yang telah dilakukan terhadap peningkatan SDM bidang pertanian Desa Cintanagara, pelaksanaan monitoring dilakukan

sebatas rekapitulasi data jika masyarakat tersebut menyampaikannya sendiri tanpa dilakukannya perencanaan penjadwalan yang matang mengenai pelaksanaan monitoring tersebut.

b. Bina Usaha

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan bina usaha dilakukan sebagai salah satu pemberdayaan yang ditujukan untuk usaha masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Cintanagara yang dilakukan dengan tahapan dari mulai tahapan identifikasi, pelatihan, monitoring terhadap usaha masyarakat yang telah dilakukan pembinaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mardikanto(2019:114) Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi), dan bahkan menambah kekecewaan Sebaliknya hanya bina manusia yang mampu memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa pelaksanaan identifikasi potensi usaha pertanian sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh pemerintahan Desa Cintanagara namun dalam hal ini dalam melakukan monitoring terhadap pelatihan dan pembinaan serta terhadap pelaku usaha

pertanian yang telah dibina belum dilakukan berdasarkan ketentuan yang seharusnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya perencanaan yang baik mengenai pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan serta tidak adanya jadwal monitoring yang dilakukan terhadap usaha pertanian yang telah dibina. Dengan demikian *output* pemberdayaan masyarakat tani menjadi tidak tercapai sesuai dengan tujuan yaitu menciptakan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tani dikarenakan pelaksanaan bina usaha pertanian yang diadakan melalui pelatihan dan pembinaan tersebut terkesan dilakukan sekedar melaksanakan program saja.

c. Bina Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian selain dari pembinaan usaha dan SDM, ternyata hal yang berpengaruh dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan diantaranya adalah bina lingkungan. Karena lingkungan menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh baik bagi pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilakukan terutama lingkungan fisik dimana masyarakat selalu menjaga lingkungan dengan cara menjaga kebersihan, tetapi dalam pemerintah desa hanya terfokus kepada lingkungan fisik saja tidak memperhatikan lingkungan sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto (2019:115) Selama ini, pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian

sumberdaya alam dan pelestarian hidup. Tetapi dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan social juga sangat berpengaruh terhadap berkelanjutan bisnis dan kehidupan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa pelaksanaan bina lingkungan pertanian yang dilakukan di Desa Cintanagara belum dilaksanakan dengan maksimal hal tersebut terlihat dari pelaksanaan identifikasi lingkungan pertanian yang belum terakomodir dengan baik dikarenakan pembinaan lingkungan pertanian yang tidak menjadi prioritas serta pelaksanaan monitoring yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, hal tersebut mengakibatkan dari tujuan pemberdayaan masyarakat tani yang dilakukan menjadi tidak tercapai.

d. Bina Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian, bina lembaga mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dukungan lembaga (kelompok tani dan gapoktan) yang mampu mendorong terhadap perkembangan masyarakat serta mampu sejalan dengan pemerintahan desa melalui seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerinatahan desa maka akan menciptakan sinergitas yang baik yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dipaparkan oleh prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto (2019:114) Bahwa tersedianya dan

efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan. Pengertian kelembagaan seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi) tetapi kelembagaan memiliki arti yang sangat luas. Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu "social institution" atau pranata-sosial dan "social organization" atau organisasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, diketahui bahwa pelaksanaan bina lembaga (kelompok tani dan gapoktan) yang dilakukan di Desa Cintanagara belum mampu memaksimalkan tujuan pelaksanaan pemberdayaan dalam hal peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan SDM dan pemahaman pemerinatahan desa dalam bersinergi bersama lembaga (kelompok tani dan gapoktan) yang dapat mendukung perkembangan masyarakat tani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis maka penulis memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian oleh pemerintah Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis merupakan langkah

dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Cintanagara. Dalam pelaksanaannya dapat melalui beberapa pembinaan seperti yang dikemukakan oleh prof. dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S (2019:113) yang memaparkan bahwa terdapat empat upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan. Namun dari seluruh pelaksanaan pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian oleh pemerintah Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis belum dilakukan secara maksimal sepenuhnya terutama dalam Bina Lingkungan pertanian dan Bina Kelembagaan (kelompok tani dan gapoktan), hal ini dikarenakan terbatasnya SDM dan tenaga serta waktu mengenai hal tersebut.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis dalam seluruh pelaksanaannya diantaranya adalah teknis dalam melakukan identifikasi yang kurang tersencana, adanya pelaksanaan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan kurang terencana, tidak adanya agenda dan penjadwalan dalam melakukan monitoring sehingga hasil dari pelaksanaannya pemberdayaan yang dilakukan menjadi kurang maksimal dan output yang dihasilkan menjadi kurang jelas. Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian Oleh Pemerintah Desa

Cintanagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis agar berjalan sesuai dengan harapan, yaitu dengan melakukan kerjasama dalam melakukan identifikasi setiap potensi yang ada dalam masyarakat baik potensi usaha pertanian, SDM para petani, lingkungan pertanian maupun lembaga (kelompok tani dan gapoktan), melakukan pengagendaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan, serta melakukan kerjasama bersama seluruh pihak dalam melakukan monitoring dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Cintanagara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Petani
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial. Bandung* : Refika Aditama.
- Soetomo. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sri rahayu, Endang. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Tani.* Bandung:Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (edisi revisian). Bandung: PT Refika Aditama
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa
- Yuliani, Dini, Kiki Endah, and Asep Nurwanda."Identifikasi Karakteristik Kreativitas Masyarakat Menuju Desa Inovatif (Studi Di Desa Kawasan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis)." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 4.2 (2018): 40-52.